

artikel ardyan4

by Ardyan Artikel

Submission date: 18-Sep-2019 09:36AM (UTC+0700)

Submission ID: 1174849440

File name: N_ANGGARAN_PENDAPATAN_DAN_BELANJA_DAERAH_KABUPATEN_PONOROGO.pdf
(494.33K)

Word count: 5320

Character count: 30888

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PONOROGO

Ardyan Firdausi Mustoffa

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

ardyanfirdausi@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang Kinerja Keuangan Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Ponorogo pada rentang waktu 2012-2017. Penelitian yang dilakukan menggunakan angka untuk mengumpulkan, menafsirkan, dan menampilkan hasil penelitian atau disebut dengan penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan diambil dengan cara dokumentasi. Dokumentasi dengan menggunakan laporan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada rentang waktu 2012-2017. Penelitian yang dilakukan menunjukkan hasil bahwa (1) Kabupaten Ponorogo menunjukkan hasil yang baik pada penilai¹ Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah. Hasil tersebut ditunjukkan dengan (a) Varians Pendapatan Daerah rata-rata lebih dari 100%, (b) Pendapatan Daerah memiliki pertumbuhan rata-rata (positif) 12.15%, (c) Menurut Derajat Desentralisasi Rasio Keuangan Pendapatan Daerah rata-rata kurang baik dengan nilai 11.40%, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memiliki nilai tinggi sekitar 85.06%, ¹ Rasio Efektifitas dan Efisiensi Pajak Daerah memiliki nilai rata-rata 117.64%. (2) Kinerja Keuangan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo secara umum dinilai bagus. Hal itu ditunjukkan (a) Varians Belanja Daerah secara umum di bawah 100%, (b) Belanja Daerah memiliki pergerakan tumbuh sekitar 14,57%, (c) Pemerintah Kabupaten Ponorogo menggunakan mayoritas¹ anggarannya untuk belanja operasi sekitar 83.74% memiliki perbandingan dengan Belanja Modal ¹ rata-rata 15.90%, (d) Efisiensi Belanja Daerah memiliki nilai baik yaitu dibawah 100%.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja APBD

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat melindungi asset yang dimiliki oleh suatu daerah. Laju perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP) semakin cepat dengan adanya era baru pelaksanaan pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik juga dapat menilai kondisi perkembangan suatu daerah.

Perkembangan tiap daerah tergantung pada potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Oleh karena itu pemerintah memberikan hak otonomi daerah

untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada di daerah tersebut. Pencapaian dan keberhasilan ⁵ pengelolaan Keuangan Daerah dapat dinilai dengan menggunakan Pengukuran Kinerja Keuangan. Pengukuran Kinerja Keuangan dilakukan untuk menilai akuntabilitas yang dimiliki oleh Kinerja Keuangan Daerah tersebut. Akuntabilitas meliputi nilai efektif, efisien dan ekonomis dalam penggunaan Keuangan Daerah untuk kepentingan public agar tercapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Mardiasmo pengertian efektif adalah tercapainya sasaran yang maksimal, efektif adalah tercapainya tujuan yang telah ditentukan dan ekonomis adalah penggunaan sumber daya dengan hasil yang maksimal dan harga yang rendah.

Penyusunan APBD dengan menggunakan *incremental budget* seringkali tidak menghiraukan Kinerja Keuangan. Penyusunan tersebut membuat perkiraan pendapatan dengan nilai yang kurang, sehingga pada saat realisasi terkesan baik dalam pencapaian Kinerja Pendapatan Daerah. Sebaliknya, pengeluaran disusun dengan nilai yang lebih besar, sehingga sangat rentang terjadi penyelewengan dalam penggunaannya. Sektor bisnis telah banyak yang melakukan Analisis Kinerja Keuangan sebagai cara untuk mengendalikan keuangan. Namun, hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam keuangan APBD Pemerintah. ⁵ Sehingga, diperlukan penggunaan Kinerja Keuangan sebagai cara untuk mengukur Kinerja Keuangan dari Pemerintah setempat agar ⁵ dapat dikendalikan kecurangan yang ada.

Kinerja keuangan pemerintah dapat dinilai dengan menggunakan realisasi dari anggaran yang telah disusun. Realisasi anggaran menunjukkan kinerja pemerintah yang telah dicapai berdasarkan rencana yang telah disusun. Peringkat dan kinerja pemerintah dapat dinilai berdasarkan pencapaian yang telah dilakukan dengan melihat perbandingan tersebut.

Pencapaian yang dimiliki akan menunjukkan Kinerja Keuangan yang dilakukan oleh otonom dalam mengelola keuangan daerahnya. Artinya dalam mengelola APBD diberikan kebebasan dan kewenangan sesuai dengan kondisi daerahnya. Pengelolaan keuangan di Kabupaten Ponorogo dinilai kurang baik

karena terdapat pembengkakan dana anggaran untuk karyawan (www.asncpns.com). Oleh karena itu Ponorogo merupakan salah satu daerah yang menyandang status merah “ranah rawan bangkrut” (Asma, 2016).

11 TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

“APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember” (Permendagri No. 13 tahun 2006). Menurut Bastian (2006) APBD merupakan rencana kerja dalam masa kurun waktu selama satu tahun kerja dan memiliki tujuan utama untuk menyejahterakan masyarakat. Berikut struktur APBD menurut Permendagri no. 13 tahun 2006:

1. Pendapatan Daerah

Adalah seluruh pendapatan daerah yang berupa penambahan aktiva atau pengurangan hutang dalam satu rentang waktu anggaran tersebut. Pendapatan daerah dapat berasal dari berbagai sumber diantaranya adalah dari sektor pariwisata yang dimiliki oleh daerah, keuntungan dari Badan Usaha Milik Daerah seperti PDAM dan pajak daerah.

2. Belanja Daerah

Adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam kurun waktu satu periode anggaran akuntansi. Menurut Halim (2002) belanja daerah adalah seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh daerah dalam kurun waktu satu periode anggaran.

3. Pembiayaan daerah

Adalah sumber pendapatan dan belanja daerah yang digunakan untuk menutup kekurangan atau kelebihan anggaran. Langkah kreatif yang dilakukan oleh pemerintah adalah memisahkan pendapatan asli yang diperoleh dari daerah dan pendapatan yang berasal dari hutang daerah dengan adanya pos pembebanan atau pembebanan.

Kinerja APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah)

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Sumarjo (2010) Kinerja Keuangan Daerah merupakan perolehan dan pencapaian yang diperoleh daerah dari program-program yang direncanakan atau yang sudah terlaksanakan dan dinilai berdasarkan suatu tolak ukur, tolak ukur yang digunakan biasanya adalah efisiensi, efektivitas dan ekonomis fasilitas atau layanan yang ditujukan kepada publik. Kinerja Keuangan Daerah dapat digunakan untuk menilai keberhasilan daerah dalam menjalankan hak otonom dalam mengelola daerahnya masing-masing berdasarkan pencapaian-pencapaian dari rencana yang telah disusun dan dinilai berdasarkan tolak ukur Kinerja Keuangan tersebut (Abdul halim, 2010).

Parameter yang digunakan dalam menganalisis pencapaian kinerja dapat menggunakan parameter input, output, pengaruh, manfaat dan dampak dari tujuan yang telah direncanakan. Berikut bagian-bagian analisis kinerja yang dikemukakan oleh Mahmudi (2007) diantaranya adalah:

1. ANALISIS KINERJA PENDAPATAN

Kinerja pendapatan daerah dapat dinilai bagus jika pendapatan yang diperoleh melebihi rencana yang telah ditentukan. Namun cara untuk menilai kinerja pendapatan bukan hanya dengan realisasi tersebut. Beberapa cara yang dapat digunakan diantaranya adalah:

a. Analisis Selisih Anggaran Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) anggaran pendapatan daerah dinilai bagus jika pendapatan yang diperoleh lebih besar dari rencana anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan, anggaran dinilai kurang baik jika pendapatan daerah kurang dari rencana yang telah ditetapkan. Penyajian perbedaan antara realisasi dan rencana tersebut disajikan dalam suatu laporan untuk menilai hasil dari kinerja yang dilakukan pemerintah dan membantu pihak lain dalam menganalisis anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Menurut Mahmudi (2010) pertumbuhan keuangan daerah dinilai baik jika mengalami pertumbuhan yang meningkat dan dikatakan kurang

baik jika mengalami pertumbuhan manurun dalam satu periode anggaran.

1
c. Analisis Rasio Keuangan Daerah

Rasio keuangan daerah merupakan perbandingan yang menggambarkan tentang posisi keuangan yang menunjukkan perbedaan antara satu jumlah dengan jumlah yang lainnya (Munawir, 2001). Beberapa jenis rasio diantaranya adalah:

1) Rasio Derajat Desentralisasi

Menurut Mahmudi (2010) Rasio Desentralisasi dapat menunjukkan prestasi pemerintah dalam mengelola pendapatan yang ada di daerah tersebut dengan maksimal. Semakin tinggi kontribusi PAD terhadap pendapatan maka kinerja pemerintah dinilai semakin baik.

1
2) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Semakin rendah rasio ketergantungan keuangan daerah maka semakin baik kondisi dari daerah tersebut. Penilaian rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dinilai dengan perbandingan transfer yang diperoleh dari pemerintah dan total penerimaan daerah. Standar maksimal ketergantungan daerah adalah 50% dan jika melebihi nilai tersebut maka pemerintah dinilai kurang baik.

1
3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pajak Daerah

Menurut Mahmudi (2010) rasio efektivitas dan efisiensi pajak dikatakan baik jika pemerintah mampu menghimpun pajak sesuai dengan target yang telah disusun. Standar rasio penghimpunan pajak dinilai bagus jika tercapai 100% dan dikatakan tidak baik jika <10%.

1
2. ANALISIS KINERJA KEUANGAN BELANJA DAERAH

Kinerja keuangan belanja daerah dapat dilihat dari penyajian laporan realisasi anggaran. Penyajian dengan membandingkan laporan realisasi dan rencana akan mempermudah dalam penilaian kinerja keuangan belanja

daerah. Kinerja yang dinilai adalah efektivitas, efisiensi dan ekonomis dalam penggunaan anggaran belanja daerah. Efektivitas dinilai baik jika pemerintah mampu mengelola pengeluaran sesuai rencana yang telah ditetapkan, jika pengeluaran yang dilakukan boros dan tidak sesuai rencana maka efektivitasnya dinilai kurang baik. Efisiensi anggaran dikatakan baik jika pengeluaran yang dikeluarkan bernilai lebih rendah dari anggaran yang telah disusun, sedangkan pengeluaran yang lebih besar dari anggaran belanja dikatakan tidak baik efisiensi anggaran yang dilakukan. Ekonomis anggaran dikatakan baik jika pemerintah mampu memperoleh kualitas yang sesuai standar dengan harga yang lebih murah. Beberapa analisis kinerja keuangan belanja daerah dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

a. Analisis Varians Belanja

Menurut Mahmudi (2010) pemerintah memiliki kinerja yang baik jika analisis varians belanja menunjukkan nilai yang negatif atau belanja yang dilakukan pemerintah lebih rendah dari jumlah anggaran yang telah direncanakan. Namun, jika analisis varians belanja menunjukkan pergerakan yang positif maka kinerja pemerintah dikatakan kurang baik, karena belanja yang dilakukan pemerintah lebih besar dari anggaran yang telah ditentukan. Penyajian analisis varians belanja disajikan dalam bentuk prosentase ataupun selisih nilai nominal anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Menurut Mahmudi (2010) analisis pertumbuhan belanja daerah digunakan untuk menilai kecenderungan anggaran yang digunakan untuk belanja. Nilai belanja cenderung semakin meningkat dari satu waktu ke waktu lainnya, hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah inflasi, kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), kenaikan harga kebutuhan secara serentak atau sebagian. Beberapa penyebab kenaikan belanja tersebut dibagi dalam dua

kelompok yaitu kenaikan yang telah diprediksi dan diramalkan dan kenaikan yang diluar dugaan.

c. Analisis Keserasian Belanja

Analisis Keserasian Belanja menggambarkan tentang proporsional anggaran yang dibelanjakan pemerintah untuk beberapa kepentingan. Kepentingan untuk publik dan pembangunan sarana prasarana umum seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah karena tujuan utama pembuatan anggaran belanja daerah adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Keserasian Belanja Daerah dapat dinilai berdasarkan beberapa analisis diantaranya adalah:

1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja;

Menurut Mahmudi (2010) proporsional anggaran untuk belanja operasi adalah 60-90% dari total belanja pada tahun anggaran tersebut. Belanja operasi adalah pengeluaran yang digunakan untuk belanja terhadap keperluan yang habis dalam satu tahun anggaran.

2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja;

3. Proporsional belanja modal yang standard menurut Mahmudi (2010) adalah kisaran 5-20% dari total anggaran belanja yang telah disusun. Belanja modal dapat berupa investasi atau inventaris yang nilainya tidak akan habis dalam satu tahun anggaran. Belanja modal biasanya memiliki nilai yang tinggi dan biasanya membutuhkan pemeliharaan untuk biaya perawatan inventaris maupun investasi.

4. Analisis Efisiensi Belanja Daerah

5. Efisiensi Belanja Daerah dikatan baik jika rasio yang dimiliki <100%, namun jika rasio yang dimilikinya >100% maka efisiensi belanja daerah dinilai kurang baik. Rasio tersebut menggambarkan penghematan yang dilakukan pemerintah dalam belanja menggunakan anggaran.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pendapatan

a. Analisis Varians Anggaran Pendapatan Daerah

Tabel 1.

Analisis Varians Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	APBD			
	Anggaran Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Selisih	Persentase Realisasi
2012	1,256,708,019,055.74	1,270,454,466,408.21	13,746,447,352.47	101.09
2013	1,425,892,462,719.16	1,452,191,618,348.57	26,299,155,629.41	101.84
2014	1,642,602,239,525.66	1,704,809,253,588.94	62,207,014,063.28	103.79
2015	1,864,337,393,996.16	1,866,869,447,087.82	2,532,053,091.66	100.14
2016	2,108,777,984,508.57	2,026,630,853,798.86	(82,147,130,709.71)	96.10
2017	2,246,177,607,360.96	2,215,197,920,702.07	(30,979,686,658.89)	98.62
Total	10,544,495,707,166.20	10,536,153,559,934.50	22,637,539,427.11	100.26

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa nilai realisasi pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo memiliki varians yang rata-rata baik karena realisasi anggaran yang dimiliki cenderung diatas target yang telah direncanakan yaitu 100.26%. Nilai persentase realisasi anggaran diatas target pada tahun 2012-2015 dan dibawah target anggaran pada tahun 2016 dan tahun 2017. Persentase Realisasi pendapatan daerah tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 103.79% dan nilai terendah pada tahun 2016 yaitu 96.10%. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis varians anggaran pendapatan daerah Ponorogo rata-rata baik karena diatas rencana dan bernilai >100%.

1
b. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Tabel 2.

Analisis Tren Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2012-2017

1 Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2012	1,074,005,217,187.92	1,270,454,466,408.21	196,449,249,220.29	18.29
2013	1,270,454,466,408.21	1,452,191,618,348.57	181,737,151,940.36	14.30
2014	1,452,191,618,348.57	1,704,809,253,588.94	252,617,635,240.37	17.40
2015	1,704,809,253,588.94	1,866,869,447,087.82	162,060,193,498.88	9.51
2016	1,866,869,447,087.82	2,026,630,853,798.86	159,761,406,711.04	8.56
2017	2,026,630,853,798.86	2,215,197,920,702.07	188,567,066,903.21	9.30
Total	9,394,960,856,420.32	10,536,153,559,934.50	1,141,192,703,514.15	12.15

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa nilai pertumbuhan pada tahun 2012 adalah 18.29%, pada tahun 2013 adalah 14.30%, pada tahun 2014 adalah 17.40%, pada tahun 2015 adalah 9.51%, pada tahun 2016 adalah 8.56%, pada tahun 2017 adalah 9.30%. persentase pertumbuhan tertinggi pada tahun 2012 yaitu sebesar 18.29% dan persentase pertumbuhan terendah yaitu pada tahun 2016 sebesar 8.56%. Berdasarkan pemaparan hasil tersebut dapat disimpulkan pertumbuhan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan yang positif dan dikatakan memiliki pertumbuhan baik.

c. Analisis Rasio Keuangan Daerah

1) Derajat Desentralisasi

Tabel 3.
Derajat Desentralisasi

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan Daerah	Derajat Desentralisasi (%)
2012	108,766,406,815.21	1,270,454,466,408.21	8.56
2013	134,097,320,780.57	1,452,191,618,348.57	9.23
2014	198,730,421,479.94	1,704,809,253,588.94	11.66
2015	210,695,348,134.82	1,866,869,447,087.82	11.29
2016	240,111,321,573.88	2,026,630,853,798.86	11.85
2017	308,232,104,639.07	2,215,197,920,702.07	13.91
Total	1,200,632,923,423.49	10,536,153,559,934.50	11.40

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 adalah 8.56%, pada tahun 2013 adalah 9.23%, pada tahun 2014 adalah 11.66%, pada tahun 2015 adalah 11.29%, pada tahun 2016 adalah 11.85% dan pada tahun 2017 adalah 13.91%. Derajat desentralisasi tertinggi yaitu pada tahun 2017 sebesar 13.91 dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 8.56%. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa derajat desentralisasi kabupaten Ponorogo sangat kurang dari standard yang dikeluarkan oleh YPAPI karena memiliki nilai rata-rata sebesar 11.40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah kabupaten Ponorogo dalam mengelola sumber PAD kurang baik dan diperlukan pengembangan terhadap kemampuan sumber-sumber yang dapat menambah PAD.

2) ¹ Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tabel 4.

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah (Dalam %)
2012	1,121,931,690,123.00	1,270,454,466,408.21	88.31
2013	1,307,923,036,465.00	1,452,191,618,348.57	90.07
2014	1,450,906,695,456.00	1,704,809,253,588.94	85.11
2015	1,629,652,904,543.00	1,866,869,447,087.82	87.29
2016	1,658,819,397,771.00	2,026,630,853,798.86	81.85
2017	1,792,943,603,063.00	2,215,197,920,702.07	80.94
Total	8,962,177,327,421.00	10,536,153,559,934.50	85.06

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

⁴ Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan keuangan daerah ³ pada tahun 2012 adalah sebesar 88.31%, pada tahun 2013 adalah sebesar 90.07%, pada tahun 2014 adalah sebesar 85.11%, pada tahun 2015 sebesar 87.29%, pada tahun 2016 sebesar 81.85%, dan pada tahun 2017 adalah sebesar 80.94%. Rasio ketergantungan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 90.07% dan terendah pada tahun 2017 yaitu sebesar 80.94%. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sangat tinggi karena memiliki nilai rata-rata diatas standard 50% (Munawir, 2001) yaitu senilai 85.06%.

3) Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tabel 5.
Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan Pajak Daerah	Target Penerimaan Pajak Daerah	Rasio Efektifitas Daerah (dalam %)
2012	30,472,348,079.00	26,525,000,000.00	114.88
2013	39,533,040,335.00	33,355,000,000.00	118.52
2014	44,956,557,768.00	37,999,700,000.00	118.31
2015	50,895,226,786.00	43,604,700,000.00	116.72
2016	63,109,161,849.35	53,832,060,000.00	117.23
2017	72,556,475,111.11	60,362,060,000.00	120.20
Total	301,522,809,928.46	255,678,520,000.00	117.64

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai rasio efektivitas daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 adalah sebesar 114.88%, pada tahun 2013 sebesar 118.88%, pada tahun 2014 sebesar 118.31%, pada tahun 2015 sebesar 116.72%, pada tahun 2016 sebesar 117.23% dan pada tahun 2017 sebesar 120.20%. Nilai rasio tertinggi diperoleh pada tahun 2017 yaitu sebesar 120.20% dan terendah pada tahun 2012 yaitu sebesar 114.88%. Berdasarkan hasil realisasi pendapatan pajak daerah dapat diketahui bahwa rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo dikatakan sangat baik karena nilainya cenderung naik dan memiliki nilai rata-rata diatas 100% yaitu sebesar 117.64%.

2. Belanja

a. Analisis Varians Anggaran Belanja

Tabel 6.

Analisis Varians Belanja daerah Tahun 2012-2017

Tahun	BELANJA			Persentase Realisasi APBD (dalam %)
	APBD	Realisasi	Selisih	
2012	1,316,182,341,601.78	1,265,059,005,035.88	(51,123,336,565.90)	96.12
2013	1,489,716,781,737.53	1,396,914,654,794.00	(92,802,126,943.53)	93.77
2014	1,754,050,964,898.60	1,626,511,374,280.00	(127,539,590,618.60)	92.73
2015	1,856,874,252,681.54	1,688,021,600,792.86	(168,852,651,888.68)	90.91
2016	1,916,771,179,300.43	1,765,262,480,445.00	(151,508,698,855.43)	92.10
2017	2,312,594,105,345.78	2,237,311,676,081.47	(75,282,429,264.31)	96.74
Total	10,646,189,625,565.70	9,979,080,791,429.21	(667,108,834,136.45)	93.73

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa persentase realisasi APBD di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 adalah sebesar 96.12%, pada tahun 2013 sebesar 93.77%, pada tahun 2014 sebesar 92.73%, pada tahun 2015 sebesar 90.91%, pada tahun 2016 sebesar 92.10%, dan pada tahun 2017 sebesar 96.74%. Nilai tertinggi realisasi APBD terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 96.74% dan terendah pada tahun 2015 sebesar 90.91%. Berdasarkan uraian dari tabel diatas dapat diketahui bahwa selisih belanja menunjukkan nilai yang negative dengan rata-rata persentase relalisasi sebesar 93.73%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki analisis varians anggaran belanja yang baik karena sesisihnya bernilai negatif yang berarti bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang telah direncanakan dan tidak melebihi anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Tabel 7.

1 Analisis Trend Pertumbuhan Belanja Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Anggaran Tahun Sebelumnya	Realisasi Anggaran Tahun Berjalan	Pertumbuhan	Persentase Pertumbuhan
2012	1,060,791,710,350.14	1,265,059,005,035.88	204,267,294,685.74	19.26
2013	1,265,059,005,035.88	1,396,914,654,794.00	131,855,649,758.12	10.42
2014	1,396,914,654,794.00	1,626,511,374,280.00	229,596,719,486.00	16.44
2015	1,534,140,245,996.00	1,688,021,600,792.86	153,881,354,796.86	10.03
2016	1,688,021,600,792.86	1,765,262,480,445.00	77,240,879,652.14	4.58
2017	1,765,262,480,445.00	2,237,311,676,081.47	472,049,195,636.47	26.74
Total	8,710,189,697,413.88	9,979,080,791,429.21	1,268,891,094,015.33	14.57

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas dapat diketahui bahwa persentase pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 sebesar 19.26%, pada tahun 2013 sebesar 10.42%, pada tahun 2014 sebesar 16.44%, pada tahun 2015 sebesar 10.03%, pada tahun 2016 sebesar 4.58%, dan pada tahun 2017 sebesar 26.74%. nilai tertinggi pada pertumbuhan belanja daerah terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26.74% dan terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 4.58%. Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan belanja daerah mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun anggaran berjalan. Kenaikan pertumbuhan belanja di Kabupaten Ponorogo cenderung stabil dan mengalami kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26.74%.

c. Analisis Keceragaman Belanja

Tabel 8.

1
Analisis Trend Belanja Operasi terhadap Total Belanja

Tahun	Belanja Operasi Terhadap Total Belanja	Belanja Modal Terhadap Total Belanja	Rasio Keceragaman	
			Belanja Operasi	Belanja Modal
2012	1,067,596,991,118.88	193,382,065,496.00		
	1,265,059,005,035.88	1,265,059,005,035.88	84.39	15.29
2013	1,281,781,796,279.00	110,848,141,315.00		
	1,396,914,654,794.00	1,396,914,654,794.00	91.76	7.94
2014	1,444,385,517,282.00	176,983,715,062.00		
	1,626,511,374,280.00	1,626,511,374,280.00	88.80	10.88
2015	1,359,824,885,940.86	324,169,328,852.00		
	1,688,021,600,792.86	1,688,021,600,792.86	80.56	19.20
2016	1,379,876,721,213.00	376,402,638,867.00		
	1,765,262,480,445.00	1,765,262,480,445.00	78.17	21.32
2017	1,762,481,933,761.94	465,255,813,618.53		
	2,237,311,676,081.47	2,237,311,676,081.47	78.78	20.80
Total			83.74	15.90

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada tahun ³ 2012 Belanja Operasi sebesar 84.39% ³ sedangkan belanja modal sebesar 15.29%, pada tahun 2013 belanja operasi sebesar ³ 91.76% sedangkan belanja modal sebesar 7.94%, pada tahun 2014 belanja Operasi sebesar ³ 88.80% sedangkan belanja modal sebesar 10.88%, pada tahun 2015 belanja Operasi sebesar 80.56% ³ sedangkan belanja modal sebesar 19.20%, pada tahun 2016 belanja operasi sebesar 78.17% sedangkan belanja modal sebesar 21.32%, dan pada tahun

2017 belanja Operasi sebesar 78.78% dan belanja modal sebesar 20.80%. Belanja Operasi tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 91.76% sedangkan belanja modal terbesar pada tahun 2016 yaitu sebesar 21.32% dan belanja operasi terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 78.17% sedangkan belanja modal terendah terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 7.94%. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki keserasian belanja yang baik yaitu belanja operasi memiliki nilai rata-rata sebesar 83.74% yang sesuai standard bahwa belanja modal yang serasi memiliki kisaran 60-90% (Mahmudi, 2010). Belanja modal juga memiliki keserasian yang baik yang memiliki nilai rata-rata sebesar 15.90% dengan nilai standard yang baik sebesar 5-20% (Mahmudi, 2010).

d. Rasio Efisiensi Belanja

Tabel 9.

1 Analisis Trend Efisiensi Belanja Daerah Tahun 2012-2017

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Rasio Efisiensi Belanja (dalam %)
2012	1,265,059,005,035.88	1,316,182,341,601.78	96.12
2013	1,396,914,654,794.00	1,489,716,781,737.53	93.77
2014	1,626,511,374,280.00	1,754,050,964,898.60	92.73
2015	1,688,021,600,792.86	1,856,874,252,681.54	90.91
2016	1,765,262,480,445.00	1,916,771,179,300.43	92.10
2017	2,237,311,676,081.47	2,312,594,105,345.78	96.74

Sumber: Data LKPD Kabupaten Ponorogo (2018)

Berdasarkan tabel analisis trend efisiensi belanja daerah tahun 2012-2017 dapat diketahui bahwa rasio efisiensi belanja Kabupaten Ponorogo pada tahun 2012 adalah sebesar 96.12%, pada tahun 2013 sebesar 93.77%, pada tahun 2014 sebesar 92.73%, pada tahun 2015 sebesar 90.91%, pada tahun 2016 sebesar 92.10%, dan pada tahun 2017 sebesar 96.74%. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Kabupaten Ponorogo memiliki nilai efisiensi yang baik yaitu

dibawah 100% sehingga telah terjadi penghematan pada lima tahun tersebut.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat diketahui beberapa hal yang sesuai dengan tujuan penelitian diantaranya adalah:

1. Hasil dari analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo periode 2012-2017 menggunakan analisis varians yaitu:

- a. **Analisis Varians Anggaran Pendapatan Daerah**

Kabupaten Ponorogo memiliki varians yang rata-rata baik karena realisasi anggaran yang dimiliki cenderung diatas target yang telah direncanakan yaitu 100.26%.

- b. **Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Ponorogo mengalami pertumbuhan yang positif dan dikatakan memiliki pertumbuhan baik.

- c. **Analisis Rasio Keuangan Daerah**

1. **Derajat Desentralisasi**

Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo dalam mengelola sumber PAD kurang baik karena total penerimaan yang diperoleh dari PAD masih sangat rendah dibandingkan total pendapatan daerah yaitu rata-rata sekitar 11.40%.

2. **Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Ponorogo terhadap pemerintah pusat atau pemerintah provinsi sangat tinggi karena memiliki nilai rata-rata diatas standard 50% (Munawir, 2001) yaitu senilai 85.06%.

3. **Rasio Efektivitas Pajak Daerah**

Rasio efektifitas pajak daerah Kabupaten Ponorogo dikatakan sangat baik karena nilainya cenderung naik dan memiliki nilai rata-rata diatas 100% (Munawir, 2001) yaitu sebesar 117.64%.

2. Hasil dari analisis Kinerja Keuangan Pendapatan Daerah Kabupaten Ponorogo periode 2012-2017 menggunakan analisis varians yaitu:

a. Analisis Varians Anggaran Belanja

Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki analisis varians anggaran belanja yang baik karena sisihnya bernilai negatif yang berarti bahwa realisasi belanja daerah lebih rendah dari anggaran yang telah direncanakan dan tidak melebihi anggaran.

b. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ponorogo mengalami kenaikan dari tahun anggaran sebelumnya ke tahun anggaran berjalan. Kenaikan pertumbuhan belanja di Kabupaten Ponorogo cenderung stabil dan mengalami kenaikan yang paling tinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26.74%.

c. Analisis Keserasian Belanja

Kabupaten Ponorogo memiliki keserasian belanja yang baik yaitu belanja operasi memiliki nilai rata-rata sebesar 83.74% yang sesuai standard bahwa belanja modal yang serasi memiliki kisaran 60-90% (Mahmudi, 2010). Belanja modal juga memiliki keserasian yang baik yang memiliki nilai rata-rata sebesar 15.90% dengan nilai standard yang baik sebesar 5-20% (Mahmudi, 2010).

d. Rasio Efisiensi Belanja

Kabupaten Ponorogo memiliki nilai efisiensi yang baik yaitu dibawah 100% sehingga telah terjadi penghematan pada lima tahun tersebut.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus berusaha untuk meningkatkan PAD melalui pencarian dan pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

- b. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Ponorogo juga membuka peluang investasi yang besar kepada para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Ponorogo dengan jaminan keamanan berinvestasi, prospek yang menjanjikan, dan lain-lain.

REFERENSI

- ¹ Abdul Halim. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ardyan Firdausi Mustoffa. ¹⁰ 2015. *Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Operasi (Studi pada Kab. dan Kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Prosiding Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2015 (hal. 272-283). (ISBN 978-602-0815-15-2).
- Ardyan Firdausi Mustoffa. ⁸ 2015. *Faktor-Faktor Karakteristik Pemerintah Daerah Yang Mempengaruhi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial Pada LKPD tahun 2012*. Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret 2015.
- Mardiasmo. ¹ 2014. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Presiden Republik Indonesia. ¹³ 2003. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*.
- PP No.58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- UU Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Munawir S. 2004. *Analisa Laporan Keuangan, Edisi Ketujuh, Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Liberty.

Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta:
Erlangga

artikel ardyan4

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	6%
2	openjournal.unpam.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	2%
4	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	2%
5	Submitted to Universitas Negeri Jakarta Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1%
7	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%
8	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
9	www.scribd.com Internet Source	1%

10	journal.pnm.ac.id Internet Source	1%
11	artikelpengertianmakalah.blogspot.com Internet Source	<1%
12	Submitted to Surabaya University Student Paper	<1%
13	aimos.ugm.ac.id Internet Source	<1%
14	id.123dok.com Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 20 words

Exclude bibliography Off